

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

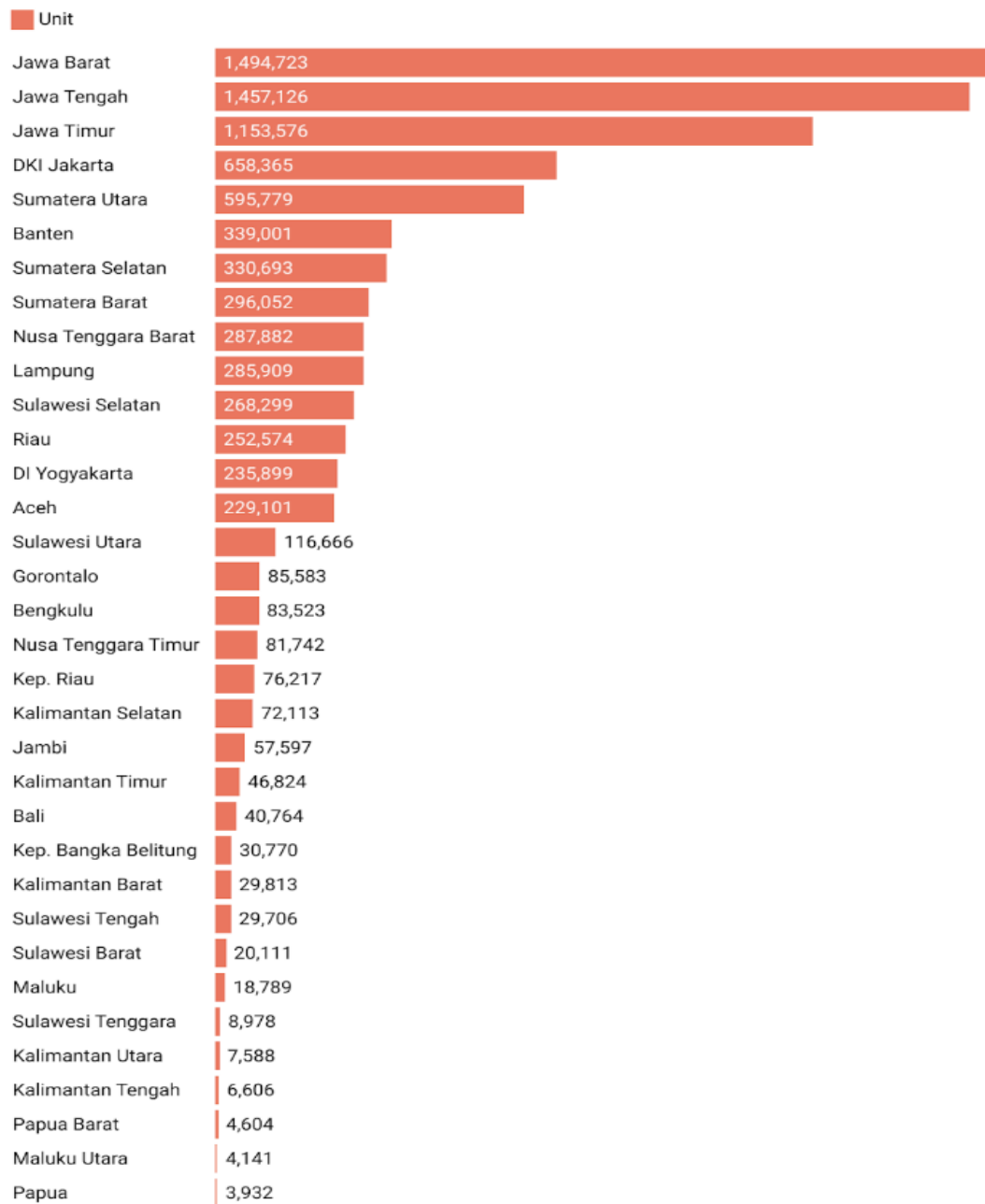
UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM merupakan perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. UMKM memiliki peran penting untuk pembangunan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan keberadaan sektor UMKM membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap pengangguran (Dewi & Rahman, 2018).

Kementerian PPN/Bappenas mengatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2018 meningkat sebanyak 0,10 persen, bahkan pada tahun 2022 meningkat sebanyak 5,3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia melaju secara positif. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik, Suhariyanto menyatakan bahwa sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha industri diikuti dengan pedagang besar maupun eceran. Pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak langsung pada lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan. Yang berarti peran pedagang

besar atau kecil mendukung dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi (Laucereno, 2019). Sektor UMKM yang terbukti mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang besar, ini menjadi solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran. Tren positif ini yang perlu terus dijaga pertumbuhannya agar sektor UMKM dalam skala yang besar maupun kecil mampu mengatasi masalah pengangguran di Indonesia.

Terdapat 10 Juta unit UMKM yang teregistrasi dalam sistem OSS di akhir tahun 2022, data ini akan terus mengalami perubahan seiring dengan kenaikan jumlah UMKM yang mendaftar di OSS. Pertumbuhan jumlah UMKM ini menunjukkan bahwa telah banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya memiliki usaha demi kesejahteraan perekonomian hidupnya dan bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan negara tersebut. Indikator yang dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Peningkatan PDB akan berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan nasional. Peningkatan pendapatan nasional tidak terlepas adanya kontribusi dari para pelaku UMKM. Adanya UMKM juga memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam penyerapan tenaga kerja. UMKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian.

\*Berdasarkan Provinsi



**Gambar 1.1 Jumlah UMKM di Indonesia**

Sumber: Kementerian Koperasi & UKM Indonesia (2022)

Sejumlah UMKM yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia ini belum menunjukkan kinerja keuangan yang baik dan stabil. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Tanah Air kerap kali dibayangi kemungkinan gagal usaha

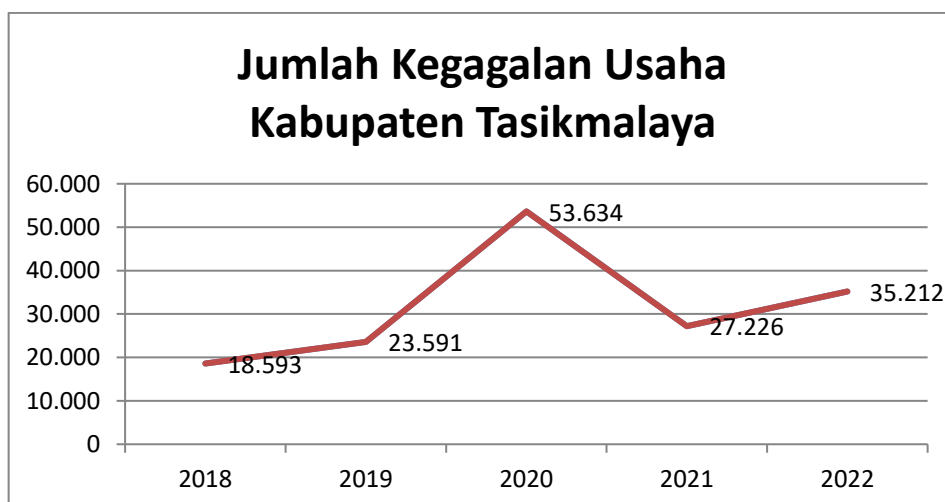
yang demikian besar yang disebabkan oleh kinerja yang buruk. Kinerja merupakan ukuran keberhasilan sebuah entitas usaha dalam mencapai tujuannya, kinerja juga merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Berdasarkan metode balanced scorecard Kinerja UMKM bisa diukur dari pertumbuhan bisnis, dimana melalui pertumbuhan yang terjadi bisa melihat kinerja UMKM. Semakin tinggi pertumbuhan bisnis, sudah jelas berarti memiliki kinerja yang tinggi baik dilihat dari volume produksi yang besar ataupun pertumbuhan pelanggan yang baik.

Penyebab kinerja yang buruk yang jarang disadari adalah masih rendahnya literasi dan inklusi keuangan pada diri para pelaku UMKM tersebut. UMKM yang merupakan 90 persen pelaku usaha di Indonesia umumnya belum mempunyai kemampuan untuk memahami pengetahuan serta keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai kesejahteraan sehingga kinerja dari usaha yang mereka jalankan mengalami penurunan secara terus menerus.. Permasalahan dalam menjalankan UMKM tidak sebatas pada manajemen perusahaan, sumber daya yang terbatas semata, dan akses permodalan yang dimiliki para pelaku usaha. Namun juga, karena rendahnya tingkat literasi keuangan pelaku UMKM menjadi salah satu penyebab minimnya akses lembaga keuangan terhadap sektor tersebut.

Adanya perkembangan ekonomi digital yang semakin maju di era digital ini juga memberikan tantangan tersendiri terhadap UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Titik yang cukup krusial dari tantangan

digitalisasi UMKM di Indonesia adalah rendahnya tingkat literasi digital, literasi keuangan, dan literasi keuangan digital. Hasil Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLK) yang digelar OJK menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia di tahun 2019 masih di angka 38,03 persen. Angka jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.

Perkembangan UMKM mengharuskan pelaku UMKM untuk siap dalam persaingan dengan UMKM lainnya, tentunya dengan kinerja keuangan yang bagus dapat mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan. Meskipun UMKM mempunyai peran yang potensial, dalam kenyataannya masih banyak masalah yang dihadapi dalam perkembangannya. Digitalisasi UMKM nasional juga menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi kinerja UMKM saat ini. Padahal mengingat jumlah penduduk yang besar, tingkat kepemilikan smartphone serta penetrasi internet tinggi, Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang besar. Potensi ini secara paralel dapat turut mendorong produktivitas UMKM.



**Gambar 1.2 Jumlah Kegagalan UMKM Kabupaten Tasikmalaya**  
Sumber: Dinas Koperasi & UMKM Kabupaten Tasikmalaya

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyebutkan bahwa para pelaku UMKM di Kabupaten Tasikmalaya yang mengalami gagal usaha terdapat sekitar 35.212. Angka tersebut menunjukkan peningkatan jumlah UMKM yang gagal usaha setiap tahunnya. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kemampuan para pelaku usaha menjalankan UMKM sesuai rencana dan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Permasalahan yang terlihat bahwa diketahui peningkatan kegagalan usaha tersebut terjadi karena kinerja yang buruk. Serta kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh para pelaku UMKM mengenai digitalisasi salah satunya literasi keuangan dan inklusi keuangan.

Tingkat literasi keuangan pada pelaku UMKM di Kabupaten Tasikmalaya masih sangat rendah, yakni dibawah 30,76%. Hal tersebut tentu saja menjadi urgensi yang harus segera diselesaikan mengingat bahwa UMKM ini adalah roda penggerak perekonomian. Maka, demi tercapainya kinerja keuangan yang baik, para pelaku UMKM harus siap sedia meningkatkan pengetahuan dan kesadaran literasi keuangan untuk meningkatkan keuntungan dan kinerja UMKM tersebut.

Pemahaman dan melek keuangan sangat dibutuhkan dalam dunia usaha. Begitu juga dengan pemahaman terhadap produk-produk keuangan usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat dan UMKM/usaha mikro kecil menengah dalam menjalankan dunia bisnisnya. Adanya inklusi keuangan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. mendukung stabilitas sistem keuangan, dan mengurangi *shadow banking* atau *irresponsible finance*. Literasi keuangan, perencanaan keuangan, produk-produk keuangan dan pembiayaan usaha /inklusi keuangan

sangat penting dan dibutuhkan oleh UMKM untuk meningkatkan usahanya, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian Indonesia.

Bagi Masyarakat yang tinggal di kota besar, layanan mungkin sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bahkan Masyarakat di kota besar sudah bisa mengaksesnya dengan leluasa menggunakan smartphone atau teknologi digital yang ada. Namun, masih ada banyak Masyarakat yang tidak memiliki akses bahkan pengetahuan tentang layanan keuangan. Tidak hanya individu, tentunya masih ada pelaku UMKM yang belum terjamah layanan keuangan padahal setor UMKM merupakan penyangga PDB besar di Indonesia.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tasikmalaya mengatakan bahwa sektor UMKM mayoritas di wilayah kabupaten Tasikmalaya adalah sektor pertanian yaitu sekitar 30%. Dan 70% dari mereka memiliki tingkat literasi keuangan yang sangat rendah, hal itu disebabkan karena mayoritas para pelaku UMKM sektor pertanian berada di pedesaan yang minim akses terhadap pengetahuan. Padahal, UMKM sektor pertanian ini merupakan sektor unggulan, karena kebanyakan dari mereka berwirausaha pada bahan pangan yang menjadi sumber pokok kehidupan.

UMKM sering mengalami keterlambatan dalam perkembangannya, hal ini disebabkan berbagai masalah konvensional yang tidak terselesaikan secara tuntas seperti masalah kapasitas sumber daya manusia, kepemilikan, pembiayaan, pemasaran dan berbagai masalah lain yang berkaitan dengan pengelolaan usaha. Oleh karena itu, perlu adanya upaya strategis untuk meningkatkan kinerja UMKM (Aribawa, 2016). Salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kinerja dan

keberlangsungan UMKM yaitu dengan memperkaya pengetahuan pelaku UMKM terhadap Literasi Keuangan sehingga pengelolaan dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan dengan lebih baik. Pengetahuan keuangan ini penting bagi para pelaku UMKM karena dapat mengurangi risiko bangkrut dan memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Selain itu, UMKM masih sulit dalam mengembangkan usaha mereka karena kesulitan modal. Untuk mengatasi masalah permodalan tersebut salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menerapkan inklusi keuangan (Yanti, 2019). Inklusi keuangan yaitu akses bagi setiap orang atau bisnis untuk bisa memanfaatkan produk maupun layanan keuangan. Layanan ini memegang peranan penting untuk bisa memenuhi segala kebutuhan manusia setiap hari, seperti transaksi pembayaran, tabungan, kredit serta asuransi yang bisa dikerjakan secara efektif dan berkelanjutan (Sisilia & Wayan, 2022).

Berdasarkan fenomena yang ada dan didukung dengan penelitian terdahulu yang peneliti temukan, maka dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan dapat menjadi factor yang mempengaruhi umkm mencapai kinerja yang optimal, dan membantu para pelaku UMKM dalam mengatasi resiko yang terjadi dalam pengelolaan maupun pengambilan keputusan. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Sektor Pertanian Kabupaten Tasikmalaya)”**.



## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, masalah utama dalam penelitian ini adalah menurunnya kinerja UMKM sektor pertanian di kabupaten Tasikmalaya, menggunakan beberapa factor yang mempengaruhi yaitu Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. Maka dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Kinerja pada UMKM sektor pertanian di Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM Sektor Pertanian di Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM sektor Pertanian di Kabupaten Tasikmalaya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Kinerja pada UMKM sektor pertanian di Kabupaten Tasikmalaya
2. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM Sektor Pertanian di Kabupaten Tasikmalaya
3. Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM sektor Pertanian di Kabupaten Tasikmalaya

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat, sebagai Kegunaan Praktis, yaitu:

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk membentuk kebijakan dan merancang strategi dalam meningkatkan kinerja UMKM dengan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. Serta mengevaluasi apakah upaya yang telah dilakukan pemerintah sudah sesuai target yang ingin dicapai atau masih perlu menambah langkah untuk meningkatkan literasi keuangan, inklusi keuangan serta kinerja UMKM.

b. Bagi Perusahaan/Pelaku Usaha

Bagi Perusahaan penelitian ini diharapkan memberikan dorongan kepada perusahaan untuk mengedukasi para pelaku usaha agar semakin memahami dan mampu menggunakan layanan keuangan yang ada dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bagi para pelaku usaha penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan atau pertimbangan kepada para pelaku UMKM, yang berkaitan dengan perilaku pelaku usaha dan modal usaha untuk lebih mengembangkan usahanya.

## **1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah UMKM wilayah Kabupaten Tasikmalaya

### **1.5.2 Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2023 sampai dengan April 2024.